

KINERJA APARATUR KOMISI PEMILIHAN UMUM DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PILKADA KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

ALFARIO GREVENT BINSASI
NPP. 29.1284

*Asdaf Kabupaten Tomor Tengah Provinsi NTT
Program Studi Manajemen Sumber Daya Manusia Sektor Publik*

Email: 29.1284@praja.ipdn.ac.id

ABSTRACT

Problem (GAP): the author focuses on the services provided to the community in achieving a prosperous life consisting of various aspects provided, one of which is services in the aspect of increasing community participation in the Pilkada where problems regarding community participation have a clear impact experienced by the community so performance is needed good by the apparatus that handles the problem. **Purpose:** This paper aims to identify and analyze the performance of the General Election Commission apparatus of North Central Timor Regency in providing support to increase public participation. **Method:** The research method used in this research is qualitative with descriptive method and using an inductive approach. Where the data collection techniques used are interviews, observation and documentation as well as using triangulation data analysis techniques. **Results/Findings:** In this study, the researchers found various obstacles in the performance of increasing public participation by the General Election Commission apparatus, such as the lack of facilities and infrastructure, lack of human resources in this case the education of the apparatus and the apathetic mindset of the people. In addition, there are also efforts made to overcome these obstacles, such as the provision of facilities and infrastructure, providing training and training for the apparatus as well as providing political education. **Conclusion:** The performance of the ASN KPU has not been satisfactory because of the five existing performance indicators, three of them are problematic or unsatisfactory, namely: 1) The productivity of ASN performance in each stage of the existing election is considered to be lacking because the election results do not reach the national target. 2). The quality of service provided by the ASN KPU TTU is still lacking because it is seen from the quantity that the ASN owned is not in accordance with the workload, then the level of education of the apparatus still needs to be improved. 3). Responsiveness, in responding to community needs related to political education and people's mindsets has not been maximized because there are still many invalid votes and there are still many people who do not participate in the election (golput).

Keywords: Performance, Apparatus, Participation, Pilkada

ABSTRAK

Permasalahan (GAP): penulis berfokus pada pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dalam mencapai kehidupan yang sejahtera terdiri dari berbagai aspek yang diberikan salah satunya adalah pelayanan dalam aspek peningkatan partisipasi masyarakat dalam Pilkada dimana permasalahan mengenai partisipasi masyarakat mempunyai dampak yang jelas dialami oleh masyarakat sehingga dibutuhkan kinerja yang baik oleh aparatur yang menangani permasalahan tersebut. **Tujuan:** Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kinerja dari aparatur Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara dalam memberi dukungan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. **Metode:** Adapun Metode Penelitian yang digunakan dalam Penelitian ini adalah kualitatif dengan metode deskriptif dan menggunakan pendekatan induktif. Dimana Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi serta menggunakan teknik analisis data triangulasi. **Hasil/Temuan:** Dalam penelitian kali ini peneliti menemukan berbagai hambatan dalam kinerja peningkatan partisipasi masyarakat oleh aparatur Komisi Pemilihan Umum seperti kurangnya sarana dan prasarana, kurangnya sumber daya manusia dalam hal ini Pendidikan aparatur dan pola pikir masyarakat yang apatis. Selain itu ada pula upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut seperti pengadaan sarana dan prasarana, pembekalan pelatihan dan diklat bagi aparatur serta pembekalan pendidikan politik. **Kesimpulan:** Kinerja ASN KPU belum memuaskan karena dari lima indikator kinerja yang ada, tiga diantaranya bermasalah atau tidak memuaskan, yaitu: 1) Produktivitas kinerja ASN dalam setiap tahapan pemilihan yang ada dinilai masih kurang karena dari hasil pemilihan tidak mencapai target nasional. 2). Kualitas Pelayanan yang di berikan oleh ASN KPU TTU masih kurang karena dilihat dari kuantitas yang ASN yang dimiliki tidak sesuai dengan beban kerja, kemudian tingkat Pendidikan aparatur yang masih perlu ditingkatkan. 3). Responsivitas, dalam menanggapi kebutuhan masyarakat terkait Pendidikan politik dan pola pikir masyarakat belum maksimal karena masih banyak jumlah suara yang tidak sah dan masih banyak masyarakat yang tidak mengikuti Pemilihan (golput).

Kata Kunci : Kinerja, Aparatur, Partisipasi, Pilkada

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kegiatan Pilkada sangat berperan penting memastikan rotasi kepemimpinan di daerah berjalan secara demokratis. Selain itu juga memastikan agenda pemerintahan dapat berjalan efektif dan mempercepat pembangunan dan kesejahteraan. Karena itu adanya peran aparatur dalam dalam melancarkan kegiatan pilkada ini sangat penting agar kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik.

Sebelum tahun 2005, kepala daerah dan wakilnya dipilih langsung oleh Republik Demokratik Demokratik. Sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 32 tentang Pemerintahan Daerah pada tahun 2004, kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan kepala daerah atau disingkat Pilkada. Sejak saat itu, sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Pilkada telah dimasukkan ke dalam sistem pemilu dan dengan demikian secara resmi dinamai Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau disingkat Pemilukada. Pada tahun 2011, undang-undang baru tentang penyelenggaraan pemilihan umum, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011, telah disahkan. Dalam undang-undang, istilah yang digunakan adalah pemilihan gubernur, bupati, dan walikota.

Pelaksanaan UU Pilkada bertujuan untuk mewujudkan kedaulatan rakyat, menunjukkan bahwa demokrasi ada di tangan rakyat, dan terserah kepada rakyat untuk memutuskan siapa yang diwakili rakyat untuk mengatur jalannya pemerintahan di daerah, dan siapa yang dapat mempercayai dan mewakili keinginan dan kepentingan rakyat. Sehingga semakin tinggi kualitas pemilu maka semakin baik wakil rakyat dalam mengelola sumber daya di daerah dan selanjutnya pemimpin terpilih harus merealisasikan janjinya. Hal tersebut akan menjadi lebih kuat apabila pemilihan kepala daerah berlangsung secara partisipatif, baik dalam tataran proses, substansinya maupun akuntabel. Proses demokrasi adalah dari, oleh dan untuk rakyat. Partisipasi rakyat menjadi poros strategi untuk mendorong kualitas demokrasi dan pemilihan kepala daerah yang substansif.

Dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah selain partisipasi masyarakat tentu harus ada pihak yang mengatur manajemen pelaksanaan pemilihan kepala daerah mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan sampai dengan pengumuman hasil pemilihan kepala daerah, yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU). KPUD adalah komisi pemilihan umum daerah di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, sebagaimana dimaksud dalam UU No 12 tahun 2003 yang diberi wewenang khusus oleh UU No 32 tahun 2004 untuk menyelenggarakan pemilihan di tingkat provinsi dan atau kabupaten/kota (pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2005).

Sebagai penyelenggara pemilu, KPUD mempunyai tugas dan wewenang untuk merencanakan penyelenggaraan pemilu, menetapkan pemilu menurut tahapan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan, mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan berbagai tahapan penyelenggaraan pemilu.

Partisipasi masyarakat sebagai pemilih sangat penting dalam menentukan keberhasilan kegiatan pemilihan kepala daerah. Untuk itu, KPUD selalu melakukan sosialisasi politik kepada masyarakat agar bersedia menggunakan hak pilihnya pada saat pemungutan suara dilaksanakan. Dengan begitu masyarakat dapat meningkatkan pengetahuan mereka tentang politik dan berpartisipasi secara maksimal dalam penyelenggaraan pemilihan calon kepala daerah yang baik.

Kinerja KPUD Kabupaten Timor Tengah Utara dalam proses pemilihan kepala daerah langsung pada tahun 2020 tidak sesuai harapan, karena partisipasi pemilih pada pildaka TTU belum sesuai dengan target yang ditetapkan pusat yang awalnya ditargetkan sebesar 77,5%, tetapi hanya berkisar antara 74-75% saja. Menurut data yang ada dari jumlah pemilih 172.385 dalam daftar pemilih tetap (DPT), yang berpartisipasi hanya 131.016 pemilih dan sisanya sebanyak 40 ribu lebih tidak ikut berpartisipasi.

Diketahui dari sumber data bahwa tingginya jumlah pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya karena beberapa kendala, yang pertama, ketidakpedulian masyarakat yang tinggi tentang pentingnya suara mereka dalam kegiatan pemilihan kepala daerah mereka sendiri. Kedua, banyak pemilih yang berada di luar daerah sehingga pada saat pemilihan mereka tidak ada di tempat. Ketiga, jadwal pelaksanaan pemilihan yang bertepatan dengan musim tanam, sehingga para petani menggunakan waktu itu untuk ke kebun untuk menanam, keempat, adanya penegasan terkait dengan kepemilikan dokumen kependudukan. Banyak warga yang belum memenuhi syarat untuk mengikuti pemilihan seperti Kartu Tanda Penduduk sehingga mereka tidak bisa mengikuti kegiatan pemilihan. Berikut adalah jumlah partisipasi Pilkada pada setiap PASLON dan jumlah pemilih di kabupaten Timor Tengah Utara :

Tabel 1. 1
Jumlah Partisipan Pilkada di TTU 2020

No	PASLON	PEROLEHAN SUARA
1	Paket Sehati	43.685
2	Paket Fresh	38.405
3	Paket Desa Sejahtera	48.926
Jumlah		131.016

Tabel 1.2
Jumlah Pemilih Pengguna Hak Pilih tahun 2020

No	Jenis Kelamin	Jumlah Pemilih Terdaftar	Jumlah Pengguna Hak Pilih
1	Laki-laki	86.283 orang	62.720 orang
2	Perempuan	88.077 orang	69.476 orang
Jumlah		174.360 orang	132.196 orang

Jika dibandingkan dengan hasil pemilihan kepala daerah Kabupaten Timor Tengah Utara pada tahun 2015 lalu, hasil pilkada pada tahun 2020 mengalami perubahan. Pada tahun 2015 jumlah pemilih yang terdaftar sebanyak 166.479 dari jumlah pemilih terdaftar yang ada, sebanyak 107.276 orang yang menggunakan hak pilihnya dan ada sebanyak 59.203 orang yang tidak menggunakan hak pilihnya. Pada tahun 2020 dari jumlah pemilih terdaftar yang ada yaitu 174.360 orang, jumlah yang menggunakan hak pilihnya adalah 132.196 orang. Dari data yang ada maka ada perubahan jumlah partisipasi dalam pilkada tahun 2020 meskipun tidak mencapai standar yang ditetapkan secara nasional yaitu. Perubahan jumlah partisipasi dalam kegiatan pilkada ini tidak terlepas dari kinerja aparaturnya Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara.

Berdasarkan permasalahan yang terjadi, maka penulis tertarik untuk melakukan magang dan penelitian tentang keadaan sebenarnya di lapangan dengan judul “KINERJA APARATUR KOMISI PEMILIHAN UMUM DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PILKADA DI KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR”. Penulis melakukan hal ini agar permasalahan yang berkaitan dengan partisipasi rakyat dalam pilkada dapat menemukan jalan keluar dan bisa mewujudkan Pilkada yang ideal bagi masyarakat.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Pada tahun 2015 jumlah pemilih yang terdaftar sebanyak 166.479 dari jumlah pemilih terdaftar yang ada, sebanyak 107.276 orang yang menggunakan hak pilihnya dan ada sebanyak 59.203 orang yang tidak menggunakan hak pilihnya. Pada tahun 2020 dari jumlah pemilih terdaftar yang ada yaitu 174.360 orang, jumlah yang menggunakan hak pilihnya adalah 132.196 orang. Dari data yang ada maka ada perubahan jumlah partisipasi dalam pilkada tahun 2020 meskipun tidak mencapai standar yang ditetapkan secara nasional yaitu. Perubahan jumlah partisipasi dalam kegiatan pilkada ini tidak terlepas dari kinerja aparaturnya Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara.

1.3 Penelitian Terdahulu

Pertama, Penelitian karya Aqil, M., & Adil, I. (2015) dengan judul Peran Komisi Pemilihan Umum Kab. Gowa dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Masyarakat Pada pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yang berusaha menggambarkan secara jelas peran KPU kab. Gowa dalam meningkatkan partisipasi pemilih pada pemilu 2014. Hasil penelitian ini yaitu KPU kab. Gowa telah melakukan upaya untuk meningkatkan partisipasi pemilih. Ada faktor pendukung yaitu jarak yang terjangkau. Faktor penghambat, yaitu pola pikir masyarakat.

Kedua, Penelitian karya Putri Ningrum Nilamsari (2018) dengan judul Peran KPU Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif pendekatan deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan peran KPU untuk menarik partisipasi masyarakat Kab. Luwu dengan melibatkan beberapa pihak salah satunya tokoh perempuan.

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu. Penelitian yang dilakukan oleh penulis menggunakan keadaannya yang baru serta informan yang lebih luas. GAP penelitian juga hanya ada dan merupakan masalah khusus yang terjadi di lokasi Penulis.

1.5 Tujuan.

Adapun tujuan penelitian yang dilakukan ini meliputi:

1. Untuk mengetahui kinerja aparaturnya Komisi Pemilihan Umum dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pilkada
2. Untuk mengetahui faktor apa saja yang menjadi mempengaruhi kinerja aparaturnya Komisi Pemilihan Umum dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pilkada
3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan aparaturnya Komisi Pemilihan Umum dalam mengatasi hambatan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pilkada.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian menurut Sugiyono (2016) dimana menggunakan penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif. Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif agar peneliti dapat menganalisis dan menggambarkan fenomena penelitian peneliti dengan lengkap dan runtut berdasarkan fakta-fakta yang didapatkan sehingga peneliti dapat menarik kesimpulan penelitian yang bermakna. Dalam penelitian ini, peneliti menghimpun data dengan melakukan teknik yang meliputi wawancara (*interview*), observasi (*observation*), dan dokumentasi (*taking notes*). Sedangkan teknik analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Simangunsong (2016).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. KINERJA APARATUR KOMISI PEMILIHAN UMUM DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PILKADA DI KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Pada penelitian ini penulis memfokuskan dengan dimensi dan indikator yang mengacu pada teori Agus Dwiyanto (2012:50-51) yakni: Produktivitas, Kualitas Layanan, Responsivitas, Responsibilitas, dan Akuntabilitas.. Dengan memperhatikan kelima indikator kinerja ini diharapkan dalam kinerja aparatur dapat sesuai dengan tujuan kerja aparatur.

A. PRODUKTIVITAS

- Produktivitas adalah rangkaian proses dari suatu pekerjaan yang akan menghasilkan result atau output tertentu sesuai dengan bidang pekerjaan yang dikerjakan. Adapun indikator dari dimensi produktivitas yang penulis pilih yaitu kinerja pegawai dan kuantitas kerja pegawai.
- Produktifitas kinerja ASN di KPU Kab. TTU dapat dilihat dari capaian kinerja ASN itu sendiri dalam mendukung dan memfasilitasi para komisioner dan para honorer dalam proses pelaksanaan PILKADA yang telah diberi patokan sudah tercapai dalam hal ini KPU Kab. TTU telah mampu melaksanakan kegiatan PILKADA dengan baik. Kinerja ASN di KPU dikaitkan dengan semua tahapan yang ada dalam proses pelaksanaan pemilihan dipastikan baik. Indicator yang dapat membuktikan bahwa kinerja ASN baik yaitu dengan adanya Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan yang kedua yaitu tidak adanya gugatan pada Mahkamah Konstitusi (MK), ini berarti semua tahapan proses pemilihan yang dilakukan di Kab. TTU sudah berjalan dengan baik.
- ASN Sekretariat Kab. TTU selalu memberikan dukungan dan pelayanan kepada para komisioner dan para honorer dalam setiap tahapan pemilihan yang ada, baik itu memfasilitasi dalam bentuk dana, infrastruktur maupun tenaga. ASN Sekretariat selalu memberikan dukungan kepada para komisioner dan honorer. Dapat dilihat dari bagaimana mereka memberi dukungan dalam menetapkan DPT (daftar pemilih tetap). Dalam menyusun DPT, Sekretariat KPU Kab. TTU bekerja sama juga dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yaitu mengambil Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4), kemudian didistribusikan kepada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan kepada Panitia Pemungutan Suara (PPS). Kemudian PPS yang bertugas mencocokkan data dengan para pemilih dengan cara mendatangi rumah ke rumah (RT). Setelah itu data hasil pencocokan ditetapkan melalui sidang Pleno ketetapan DPS. Dan DPS ini dikoreksi kemudian ditetapkan terhadap DPS, diteruskan ke PPK dan sampai ke Sekretariat KPU Kab. TTU sehingga melahirkan DPT.
- produktivitas Kinerja ASN Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara tahun 2020 belum memuaskan atau masih kurang karena masih banyak presentase partisipasi yang tidak terpenuhi atau tidak mencapai target nasional.

B. KUALITAS LAYANAN

- Kualitas Pelayanan ASN KPU Kab. TTU dapat dilihat dari jenis pelayanan yang diberikan oleh KPU Kab. TTU dalam Pilkada 2020 dibagi menjadi dua macam, yaitu kepada masyarakat sebagai pemilih dan kepada Partai Politik sebagai peserta Pilkada tahun 2020. Pelayanan kepada masyarakat dalam bentuk pemutakhiran data pemilih,

sosialisasi, informasi hasil pemilihan dan pelayanan Ketika berada di TPS. Sedangkan pelayanan kepada peserta pilkada dalam bentuk informasi jumlah pemilih, pendaftaran peserta, verifikasi peserta, hingga proses pemilihan selesai. Selain itu pelayanan yang disesuaikan dengan kebutuhan pemilih maupun peserta (situasional).

- Pelayanan yang diberikan oleh KPU Kab. TTU sudah dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat. Seperti pelayanan informasi sudah dapat diakses dengan mudah melalui *website* yang dimiliki oleh KPU Kab. TTU. Pelayanan di tingkat Kecamatan juga dapat diperoleh melalui petugas KPU yang ada di lapangan yaitu PPK, KPPS, dan PPS yang tersebar. Kemudahan lainnya juga terlihat dengan disediakannya pelayanan bagi masyarakat apabila membutuhkan pelayanan di kantor KPU Kab. TTU.
- Jumlah ASN yang ada di KPU kabupaten Timor Tengah Utara mem butuhkan tambahan pegawai karena jumlah pegawai yang ada sekarang tidak sebanding dengan beban kerja yang ada di KPU Kabupaten Timor Tengah Utara. Jumlah dan komposisi pegawai belum sesuai dengan tugas, fungsi dan beban kerja, dimana perbandingan jumlah pegawai dan beban kerja belum proporsional, kemudian pada bagian tingkat Pendidikan juga perlu ditingkatkan karena kompetensi pegawai belum sesuai dengan kebutuhan organisasi dan beban kerja.

C. RESPONSIVITAS

- Responsivitas ASN KPU Kab. TTU dapat dilihat dari bagaimana KPU Kab. TTU dalam mengenali kebutuhan masyarakat untuk dijadikan program yaitu dengan seluruh lapisan masyarakat. Dalam mengenali kebutuhan masyarakat, KPU Kab. TTU mendapat kesempatan untuk menjangkau informasi terkait dengan kebutuhan masyarakat. Waktu untuk menangkap kebutuhan masyarakat oleh KPU Kab. TTU adalah saat pra pemilihan dan masa penyelesaian.
- Dalam menanggapi aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat adalah menerima aspirasi tersebut untuk menjadi masukan bagi KPU Kab. TTU dalam mengatasi permasalahan penyelenggaraan Pemilihan, namun dalam menerima aspirasi tersebut, KPU Kab. TTU juga mempertimbangkan aspirasi tersebut dengan mempertimbangkan aspirasi tersebut dengan asas kepatutan dan kesesuaian hukum. Asas kepatutan yaitu apakah aspirasi tersebut patut untuk diterima atau tidak, sedangkan kesesuaian hukum yaitu apakah aspirasi tersebut melanggar peraturan atau tidak.
- Dari jumlah pemilih yang terdaftar berjumlah 174.360 orang, yang menggunakan hak pilihnya berjumlah 132.196 orang dengan 42.146 orang golput dan 1.180 orang suara tidak sah. Jumlah suara tidak sah dan angka golput yang tinggi ini menunjukkan bahwa kemampuan ASN dan Sekretariat KPU Kabupaten Timor Tengah Utara dalam mengetahui dan menanggapi kebutuhan masyarakat terkait Pendidikan politik dan pola pikir masyarakat yang apatis belum maksimal. Hal ini menunjukkan bahwa ASN Komisi Pemilihan Umum dalam memberikan dukungan dalam pemberian sosialisasi untuk Pendidikan politik masyarakat masih harus ditingkatkan. Pemberian Pendidikan Politik kepada masyarakat berguna bagi masyarakat yang belum paham cara mencoblos yang baik dan benar sehingga bisa mengurangi jumlah suara tidak sah. Kemudian pemberian Pendidikan politik untuk mengubah pola pikir masyarakat yang apatis.

D. RESPONSIBILITAS

- Responsivitas ASN KPU Kab. TTU dapat dilihat dari bagaimana KPU Kab. TTU dalam menyusun sebuah program maupun kegiatan dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah 2020, KPU Kab. TTU dalam menyusun program sudah sesuai dengan peraturan yang mengatur tugas dan kewenangan KPU Kab. TTU dalam melaksanakan program dan kegiatan. Regulasi yang menjadi acuan KPU Kab. TTU dalam menyusun program dan kegiatan yaitu PKPU, Peraturan Pemerintah dan Undang-Undang yang berlaku.
- Prosedur dalam penyusunan sebuah program dan kegiatan yang dilakukan oleh KPU Kab. TTU yaitu program tersebut harus menyesuaikan dengan peraturan yang telah berlaku. Peraturan ini terutama selalu memperhatikan peraturan KPU RI yang dalam menyusun program disesuaikan dengan program tersebut, KPU Kab. TTU bertugas menjabarkan peraturan tersebut melalui program-program yang akan dilaksanakan sehingga bersifat vertical.

E. AKUNTABILITAS

- Dalam menciptakan akuntabilitas, bentuk transparansi yang dilakukan oleh ASN KPU Kab. TTU dalam mendukung para komisioner dan honorer melalui dua sarana, yaitu melalui sarana website yang dimiliki KPU Kab. TTU dan juga melalui media papan pengumuman yang digunakan sebagai instrumen terkait informasi yang berhak diperoleh oleh masyarakat dan peserta pemilihan Pemilihan Kepala Daerah 2020. Untuk transparansi anggaran juga dapat dilihat pada website BPK RI setelah evaluasi dan pemeriksaan penggunaan anggaran oleh BPK.
- Bentuk pertanggungjawaban KPU Kab. TTU dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah berbentuk vertical yaitu KPU Kab. TTU menyusun pertanggungjawaban yang akan disampaikan kepada KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur, kemudian selanjutnya diserahkan kepada KPU RI dan akan dilanjutkan ke Pemerintah dan DPR sebagai *Stakeholder*.

3.2. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Temuan penting pertama yang ditemukan oleh penulis ialah terdapat perbedaan mendasar yang menunjukkan kebaruan penelitian penulis dibandingkan dengan penelitian yang dilakukan oleh Aqil, M., & Adil, I. (2015) dengan judul Peran Komisi Pemilihan Umum Kab. Gowa dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Masyarakat Pada pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014. Dimana penelitian terdahulu tersebut tidak menganalisis indikator responsivitas. Dimana Responsivitas ASN KPU Kab. TTU dapat dilihat dari bagaimana KPU Kab. TTU dalam mengenali kebutuhan masyarakat untuk dijadikan program yaitu dengan seluruh lapisan masyarakat. Dalam mengenali kebutuhan masyarakat, KPU Kab. TTU mendapat kesempatan untuk menjangkau informasi terkait dengan kebutuhan masyarakat. Waktu untuk menangkap kebutuhan masyarakat oleh KPU Kab. TTU adalah saat pra pemilihan dan masa penyelesaian. Dalam menanggapi aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat adalah menerima aspirasi tersebut untuk menjadi masukan bagi KPU Kab. TTU dalam mengatasi permasalahan penyelenggaraan Pemilihan, namun dalam menerima aspirasi tersebut, KPU Kab. TTU juga mempertimbangkan aspirasi tersebut dengan mempertimbangkan aspirasi tersebut dengan asas kepatutan dan kesesuaian hukum. Asas kepatutan yaitu apakah aspirasi tersebut patut

untuk diterima atau tidak, sedangkan kesesuaian hukum yaitu apakah aspirasi tersebut melanggar peraturan atau tidak.

Kemudian, penulis sepakat dengan dengan penelitian yang dilakukan oleh Putri Ningrum Nilamsari (2018) dengan judul ran Kpu Dalam Meningkatkan Partisipasi Poliitk Masyarakat. Bahwa indikator dari dimensi produktivitas yang penulis pilih yaitu kinerja pegawai dan kuantitas kerja pegawai. Dimana pada penelitian penulis kinerja ASN di KPU Kab. TTU dapat dilihat dari capaian kinerja ASN itu sendiri dalam mendukung dan memfasilitasi para komisioner dan para honorer dalam proses pelaksanaan PILKADA yang telah diberi patokan sudah tercapai dalam hal ini KPU Kab. TTU telah mampu melaksanakan kegiatan PILKADA dengan baik. Kinerja ASN di KPU dikaitkan dengan semua tahapan yang ada dalam proses pelaksanaan pemilihan dipastikan baik. Indicator yang dapat membuktikan bahwa kinerja ASN baik yaitu dengan adanya Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan yang kedua yaitu tidak adanya gugatan pada Mahkamah Konstitusi (MK), ini berarti semua tahapan proses pemilihan yang dilakukan di Kab. TTU sudah berjalan dengan baik.

Temuan utama yang menunjukkan kebaruaran hasil penelitian penulis dibandingkan penelitian terdahulu lainnya selain metode, informan dan lokus ialah penulis mendapati bahwa Dalam menciptakan akuntabilitas, bentuk transparansi yang dilakukan oleh ASN KPU Kab. TTU dalam mendukung para komisioner dan honorer melalui dua sarana, yaitu melalui sarana website yang dimiliki KPU Kab. TTU dan juga melalui media papan pengumuman yang digunakan sebagai instrumen terkait informasi yang berhak diperoleh oleh masyarakat dan peserta pemilihan Pemilihan Kepala Daerah 2020. Untuk transparansi anggaran juga dapt dilihat pada website BPK RI setelah evaluasi dan pemeriksaan penggunaan anggaran oleh BPK.

IV. KESIMPULAN

1. Kinerja asn kpu belum memuaskan karena dari lima indikator kinerja yang ada, tiga diantaranya bermasalah atau tidak memuaskan, yaitu:
 - a) Produktivitas kinerja ASN dalam setiap tahapan pemilihan yang ada dinilai masih kurang karena dari hasil pemilihan tidak mencapai target nasional.
 - b) Kualitas Pelayanan yang di berikan oleh ASN KPU TTU masih kurang karena dilihat dari kuantitas yang ASN yang dimiliki tidak sesuai dengan beban kerja, kemudian tingkat Pendidikan aparatur yang masih perlu ditingkatkan.
 - c) Responsivitas, dalam menanggapi kebutuhan masyarakat terkait Pendidikan politik dan pola pikir masyarakat belum maksimal karena masih banyak jumlah suara yang tidak sah dan masih banyak masyarakat yang tidak mengikuti Pemilihan (golput)
2. Hambatan yang dihadapi oleh ASN KPU TTU dalam meningkatkan partisipasi masyarakat adalah Fasilitas yang dimiliki KPU Kab. TTU dalam mendukung kinerja aparatur untuk meningkatkan partisipasi adalah kondisi Gedung dan isinya yang kurang ideal, Pendidikan yang dimiliki oleh ASN KPU TTU, masih banyak *mindset* atau pola pikir masyarakat yang masih salah, kurangnya Pendidikan politik Masyarakat, pandemi covid.
3. Upaya yang dilakukan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum dalam meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pilkada Kabupaten Timor Tengah Utara adalah dengan melengkapi sarana prasarana, mengikutsertakan para pegawai dalam kegiatan pelatihan, diklat, bimtek dan kursus secara berkala, mamaksimalkan kegiatan sosialisasi pendidikan politik dan dengan mengubah pola sosialisasi melalui media agar menghindari pandemic covid 19.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa untuk menambah rekomendasi, mengatasi permasalahan yang ada serta mencegah permasalahan krusial baru muncul.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terimakasih serta penghargaan sebesar- besarnya kepada Kepala Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara serta jajaran, seluruh dosen pengajar, pembimbing dan penguji juga seluruh pihak yang terlibat dalam penelitian ini.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Aqil, M., & Adil, I. (2015). *Peran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilihan Masyarakat pada Pemilu Presiden Tahun 2014* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar).

Dwiyanto, A. d. (2012). *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*. 2008: Gajah Mada University Press.

Nilamsari. P. N, 2018, *Peran KPU Dalam Meningkatkan Partisipasi Poliitk Masyarakat*. SKRIPSI.

Simangunsong, Fernandes. 2016. *Metodologi Penelitian Pemerintahan*. Bandung : Alfabeta.

Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: PT Alfabet.